

# MEMBANGUN *LEARNING SOCIETY* DI PERGURUAN TINGGI MELALUI PERPUSTAKAAN

Basuki\*

*Abstract : Strategic alteration which is performed by the ministry of national education concerning the strategic planning of higher education 2003-2010 causes direct consequences to the vision and mission, the output target, the organization management and the standardization at all aspects. One of the most important things that should be perceived is the standardization of library quality. The aim of that strategic planning is related to the education quality of university that all alumni must have competency and ability to accomplish their certain occupations smartly and responsibly as a requirement to be regarded highly by the society. One of indicators to assess the quality standard of library is the contribution of library to form learning society at university. This short paper will elucidate several concepts to create learning society at university through library.*

**Kata Kunci :** *Perpustakaan, learning society*

## A. Pendahuluan

Masyarakat dan bangsa Indonesia dewasa ini sedang menapak untuk mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang mencakup dua aspek. *Pertama*, mengatasi krisis nasional yang berkepanjangan dengan membangun kembali masyarakat dan bangsa yang demokratis. *Kedua*, mempersiapkan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat baru.<sup>1</sup> Krisis yang melanda kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia telah melahirkan suatu gerakan reformasi yang menuntut masyarakat baru Indonesia. Keterkaitan antara pendidikan, kebudayaan, serta seluruh kehidupan masyarakat, menuntut paradigma baru pendidikan kita di Indonesia.<sup>2</sup>

\* Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>1</sup> H.A.R. Tilaar, *Paradigama Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 164.

<sup>2</sup> Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (Jakarta: Paramadina, 2001), 3-10.

Paradigma baru pendidikan tersebut diantaranya adalah menuntut reposisi Perguruan Tinggi sebagai komunitas pembelajar,<sup>3</sup> yang mampu menciptakan masyarakat belajar (*learning society*) sebagai pondasi lahirnya masyarakat madani (*civil society*) Indonesia. Dalam hal ini, perpustakaan mempunyai peran strategis sebagai pelopor terciptanya *learning society*. Berangkat dari uraian tersebut artikel singkat ini penelitian ini akan mengungkap beberapa konsep penciptaan *learning society* di Perguruan Tinggi melalui perpustakaan.

## B. Membangun Learning Society Yang Profesional

Masyarakat belajar dapat terwujud di Perguruan Tinggi, apabila semua warga kampus selalu berusaha untuk: (1) mengejar dan mengembangkan kepandaian atau keahlian secara terus-menerus sesuai dengan bidang/ tugasnya; (2) komitmen terhadap kualitas; (3) memiliki dan mengembangkan rasa tanggungjawab moral, sosial, intelektual dan spiritual; serta (4) memiliki dan mengembangkan rasa kesejawatan dan atau *teamwork* yang cerdas, dinamis dan kompak.<sup>4</sup>

Ada beberapa karakteristik masyarakat belajar profesional,<sup>5</sup> sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1. Karakteristik Masyarakat Belajar (*learning society*) Profesional

No.	Karakteristik	Keterangan
1	<i>Shared vision, mission and values</i>	Yakni masing-masing anggota harus memiliki kesamaan pengertian dan komitmen terhadap visi, misi dan nilai-nilai yang telah disepakati untuk diperjuangkan secara bersama-sama.

<sup>3</sup> Yaitu komunitas yang mampu membangun manusia pembelajar (orang-orang yang menempatkan perbuatan belajar sebagai bagian dari kehidupan dan kebutuhan hidupnya. Lihat dalam Sudarwan Danim, *Menjadi Komunitas Pembelajar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 18.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 197.

<sup>5</sup> Lihat dalam catatan-catatan Hasil Studi Dr. Muhaimin, MA pada "School Management Training" di Kanada, bulan Oktober-Desember 2000. atau lihat dalam Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 198-200.

No.	Karakteristik	Keterangan
2	<i>Collective inquiry</i>	Yakni perlunya pengkajian secara kolektif, dalam arti semua warga madrasah merupakan regu-regu atau kelompok belajar yang kompak dan dinamis dalam mencapai visi, misi dan nilai-nilai yang disepakati, yang dalam prosesnya dapat melalui empat tahapan, yaitu <i>public reflection, shared meaning, joint planning dan coordinated action</i> .
3	<i>Collaborative teams</i>	Yakni adanya kerjasama tim secara kolaboratif belajar, bukan hanya siswa yang belajar, tetapi kepala madrasah, para staf, guru dan tenaga-tenaga lainnya juga belajar.
4	<i>Action orientations and experimentation</i>	Berorientasi pada tindakan nyata dan eksperimentasi, bukan sekedar bicara.
5	<i>Continous improvement</i>	Yakni adanya upaya perbaikan secara terus-menerus dan tidak boleh cepat puas terhadap hasil-hasil yang telah dicapainya
6	<i>Result orientation</i>	Beroirentasi pada hasil. Ini terkait dengan visi, misi dan nilai-nilai yang telah disepakati.

### C. Perpustakaan Sebagai Sumber Pembelajaran

Sebagai pusat pembelajaran atau *center of learning*, perpustakaan dituntut memenuhi standar yang diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan pendidikan berbasis *student centered learning* dan nantinya perpustakaan diharapkan menjadi acuan bagi program Dikti menuju *World Class University*. Pembenahan yang harus dilakukan oleh perpustakaan sebagai sebuah sumber pembelajaran antara lain adalah [1] sosialisasi mengenai redefinisi visi dan misi perpustakaan sebagai pedoman dasar proses pembelajaran berbasis *student centered learning*, [2] menyiapkan *Standart Operating Procedure (SOP)* berkaitan dengan syarat mutu

perpustakaan sebagai organisasi publik yang layak untuk dinilai akuntabilitasnya.<sup>6</sup>

SOP sendiri nantinya diharapkan menjadi acuan bagi top manajemen perpustakaan untuk menilai kinerja pustakawan atau pekerja di perpustakaan dalam meningkatkan standar mutu SDM, berkaitan dengan ICTs maka perpustakaan melakukan pengembangan secara lebih cepat sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama perkembangan *Information and Communication Technologies (ICTs)* yang berlangsung sangat cepat. Bukankah teknologi tinggi sangat membantu para student dalam proses pembelajaran mandiri dimana proses pembelajaran mereka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga saat ini yang mereka butuhkan adalah perpustakaan dengan era digital atau e-library. Pembenahan berikutnya menyiapkan perpustakaan menuju *World Class Library*. Meskipun belum ada wacana mengenai perpustakaan bertaraf internasional akan tetapi sebagai syarat fundamental dari sebuah perguruan tinggi bertaraf internasional salah satunya mempunyai standar perpustakaan kelas dunia. Siap atau tidak perpustakaan dituntut mempunyai *benchmark* terhadap *peer group* atau dalam kamus yang lebih mudah siap dibandingkan dan dinilai dengan perpustakaan perguruan tinggi lainnya.

#### D. Perpustakaan Bertaraf Internasional: Potret Awal Terciptanya *Learning Society* Di Kampus

Keberadaan perpustakaan di setiap perguruan tinggi menempati posisi yang strategis, urgen dan vital bagi dinamika dan progresifitas perguruan tinggi itu sendiri. Perpustakaan merupakan indikator utama dari kemajuan suatu perguruan tinggi. Mengapa demikian? Tentunya tak lain karena perpustakaan adalah unit yang menyediakan infrastruktur utama bagi perkembangan keilmuan; buku dan berbagai aset informasi lainnya (internet, dll). Kelancaran distribusi berbagai infrastruktur tersebut amat bergantung pada sejauh mana profesionalitas

---

<sup>6</sup> <http://pustaka.uns.ac.id/?opt=1001&menu=category&option=detail&cid=1>, 20/05/2009

kalangan pustakawan dalam mengelola perpustakaan, di samping juga memerlukan dukungan yang komprehensif dari semua kalangan sivitas akademika. Secara objektif setiap perguruan tinggi yang berkelas dunia juga memiliki perpustakaan yang berkualitas dunia, dalam artian ia memiliki kualitas tinggi dalam segala seginya. Menurut berbagai kalangan di Amerika, ada beberapa kriteria yang digunakan dalam mengukur kualitas suatu perpustakaan, yakni: *Services and collection* (pelayanan dan volume koleksi), *Accessibility* (aksesibilitas), *Variety of literary offerings* (keanekaragaman literatur yang disediakan), *Comfort and availability of reading/studying spaces* (kenyamanan membaca), *User Satisfaction* (kepuasan pengguna).<sup>7</sup>

Indikator tersebut dapat dijadikan acuan untuk mencapai perpustakaan bertaraf internasional. Tentu saja tidak semua indikator dapat dicapai secara optimal dalam waktu yang bersamaan, karena setiap indikator tergantung pada kondisi objektif masing-masing perpustakaan. Untuk lebih memudahkan pemahaman, di bawah ini akan diuraikan faktor-faktor penentu yang perlu dikembangkan untuk mengoptimalkan indikator mencapai perpustakaan bertaraf internasional. Uraian didasarkan pada kondisi nyata yang terjadi di perguruan tinggi di Indonesia serta solusi yang dapat dijadikan alternatif pemecahan masalah.

## 1. Pengelolaan Dana

*Perpustakaan bertaraf internasional memiliki anggaran operasional pokok sebesar rata-rata 10 % dari total anggaran universitas.*<sup>8</sup> Masalah dana sesungguhnya tidak hanya dihadapi perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. Perpustakaan di luar negeri, seperti Amerika pun tetap mengeluhkan masalah alokasi anggaran mereka. Hal ini terjadi karena investasi di perpustakaan memang tidak langsung memberikan benefit nyata bagi lembaga. *Output* dari Perpustakaan bersifat *intangible*, tidak kasat mata : masyarakat cerdas dan kritis!

---

<sup>7</sup> Menuju Perpustakaan Bertaraf Internasional , diunduh dari <http://rudra85.wordpress.com>, 19/05/2009

<sup>8</sup> Perpustakaan Sebagai Salah Satu Indikator Utama dalam Mendukung Universitas Bertaraf Internasional, diunduh dari <http://pinakesconsulting.wordpress.com>, 20/05/2009.

Sementara bagi sebagian besar lembaga atau universitas, perpustakaan belum atau bukan prioritas utama untuk dikembangkan. Namun berbeda dengan di Indonesia, perpustakaan di luar negeri lebih memiliki dukungan dari pemerintah dan kebebasan dari lembaga dalam mencari dana.

Kendala-kendala yang dialami dalam pengelolaan dana perpustakaan adalah [1] Tidak semua perpustakaan mengetahui jumlah anggaran yang dialokasikan oleh lembaga untuk operasional perpustakaan; [2] Pimpinan perpustakaan tidak memiliki akses informasi untuk mengetahui alokasi anggaran; [3] Alokasi anggaran untuk perpustakaan umumnya untuk pengadaan koleksi; [4] Pimpinan perpustakaan tidak memiliki kebebasan untuk memanfaatkan dana yang ada karena harus sesuai dengan program kerja universitas; [5] Perpustakaan hanya mengandalkan dana/anggaran dari lembaga

Solusi yang dapat ditempuh untuk mengurangi kendala-kendala tersebut adalah [1] Universitas harus menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam hal anggaran; [2] Pimpinan perpustakaan harus memiliki posisi strategis di universitas, sehingga memiliki *bargaining position* yang bagus. Universitas perlu mengakomodir kebutuhan ini dalam bentuk SK dan penyusunan struktur organisasi yang tepat; [3] Perpustakaan harus dapat meyakinkan pimpinan universitas mengenai pentingnya pengembangan perpustakaan secara keseluruhan, tidak hanya pengadaan buku; [4] Universitas harus memberikan kebebasan yang bertanggung jawab dalam hal mengelola dana, termasuk efisiensi birokrasi yang seringkali menjadi penghambat bagi kelancaran kegiatan; [5] Ciptakan peluang-peluang untuk mendapatkan dana dengan cara-cara profesional. Pustakawan harus memiliki jiwa *entrepreneurship* sehingga dapat mencari sumber dana dari luar lembaga. Cara-cara yang dapat ditempuh antara lain dengan mengadakan pelatihan<sup>2</sup> di bidang kepustakawanan, menjalin kerja sama dengan instansi lain atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan perpustakaan (seperti penerbit, media massa, pengembang software, pengembangan otomasi perpustakaan, dan perusahaan yang bergerak dalam pengadaan material perpustakaan); [6] Bentuk konsorsium antar perpustakaan.

## 2. Pengelolaan Koleksi

Perguruan tinggi bertaraf internasional memiliki rasio antara pengguna dengan jumlah koleksi, minimal 1 : 50. Artinya, 50 judul koleksi untuk satu orang pengguna. Ini masih untuk kawasan Asia seperti *National University of Singapore (NUS)* dan *Nanyang Technological University (NTU)*. Jika merujuk pada Harvard yang memiliki koleksi 16 milyar, maka dengan jumlah pengguna 1 juta saja, rasionya sudah sangat tidak terjangkau: 1 : 16.000. Angka ini sebetulnya tidak mengherankan, mengingat setiap tahun universitas pasti membeli koleksi, sementara jumlah pengguna (baca : sivitas akademika) biasanya stabil atau hanya mengalami pertambahan yang tidak terlalu signifikan, kecuali ada pembukaan program studi baru.<sup>9</sup>

Perguruan tinggi di Indonesia masih sangat jauh dari ratio tersebut. Universitas Indonesia misalnya, dengan total jumlah koleksi kurang lebih 1 juta berbanding jumlah sivitas akademika hampir 50.000 orang, rasionya masih 1 : 20. Persoalan koleksi seharusnya tidak hanya menyangkut kuantitas, tapi juga kualitas. Karena itu sangat penting mengadakan evaluasi terhadap koleksi. Hasil evaluasi juga dapat dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan pengadaan koleksi.

Kendala yang dialami dalam pengelolaan koleksi buku, adalah [1] Perpustakaan tidak memiliki kebijakan pengembangan koleksi yang tepat; [2] Keterbatasan dana dan prosedur (birokrasi) pengadaan koleksi terlalu rumit sehingga membatasi peluang mendapatkan koleksi berkualitas dan dalam waktu singkat; [3] Perpustakaan tidak memiliki peralatan yang memadai untuk perawatan koleksi; [4] Kehilangan koleksi masih sering terjadi karena sistem yang tidak mendukung; [5] Perpustakaan sering menjadi gudang penyimpanan buku karena pustakawan merasa 'tidak tega' menyingkirkan koleksi yang sudah tidak bermanfaat

---

<sup>9</sup> *Perpustakaan Sebagai Salah Satu Indikator Utama dalam Mendukung Universitas Bertaraf Internasional*, diunduh dari <http://pinakesconsulting.wordpress.com>, 20/05/2009.

Solusi yang dapat ditempuh untuk keluar dari kendala-kendala tersebut adalah [1] Kebijakan pengembangan koleksi harus merujuk pada misi dan visi universitas. Koleksi Perpustakaan harus dapat mencerminkan 'isi' universitas; [2] Manfaatkan kerjasama dengan perpustakaan lain (seperti mengadakan *inter library loan* dan akses bersama); [3] Perawatan koleksi merupakan alternatif untuk mempertahankan jumlah dan kualitas koleksi. Perpustakaan harus memiliki jadwal dan fasilitas khusus untuk perawatan koleksi (misalnya : *fumigasi*, jilid ulang, dsb.); [4] Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mencegah kehilangan koleksi. Penggunaan *security system* terbukti mampu menekan pencurian koleksi dari perpustakaan, khususnya perpustakaan yang menerapkan sistem layanan terbuka; [5] Perpustakaan harus memiliki wawasan yang luas mengenai perkembangan kurikulum di lingkungannya, sehingga mampu mengatakan: "kami tidak butuh koleksi seperti ini!" dengan alasan yang tepat.

Sebuah perpustakaan seringkali menghadapi berbagai pertanyaan baik dari organisasi induk maupun dari komunitasnya. Beberapa pertanyaan yang timbul, antara lain apakah kekuatan dari koleksi perpustakaan itu?, Seberapa efektif perpustakaan memanfaatkan dana pengembangan koleksi?, Seberapa besar manfaat koleksi terhadap komunitas yang dilayani?, Bagaimana keadaan koleksi perpustakaan itu dibandingkan dengan koleksi perpustakaan yang setara? Ada beberapa pedoman standar untuk perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan juga perpustakaan perguruan tinggi yang dapat digunakan untuk suatu evaluasi koleksi. Itulah sebagian dari pertanyaan yang bisa dijawab melalui program penilaian evaluasi koleksi. Evaluasi melengkapi siklus pembangunan koleksi dan membawa kembali pada kegiatan kajian kebutuhan informasi pengguna. Siklus pembangunan koleksi di perpustakaan secara lengkap dimulai dari seleksi (dengan memperhatikan dokumen "Kebijakan Pengembangan Koleksi"), pengadaan (termasuk proses pembelian, penerimaan, inventarisasi, penempelan barcode untuk sistem yang terkomputerisasi), katalogisasi dan klasifikasi (termasuk entri



data katalog ke komputer untuk sistem yang telah terkomputerisasi), pascakatalogisasi (penempelan label nomor panggil, slip tanggal kembali, kartu buku dan kantong buku untuk sistem yang masih manual), dilanjutkan dengan layanan sirkulasi dan referensi, kemudian dilakukan CREW (*Continues, Review, Evaluation, and Weeding*). Hasil dari proses CREW ini akan memberikan masukan pada dokumen "Kebijakan Pengembangan Koleksi", dan seterusnya.<sup>10</sup>

Bila evaluasi koleksi ini ingin dilakukan secara objektif, maka diperlukan serangkaian riset untuk mendukung pengambilan keputusan. Diakui bahwa tugas evaluasi koleksi itu sulit, dan sering kali hasilnya itu subjektif. Jadi seorang pelaksana evaluasi koleksi harus bisa menyatakan apa adanya tentang koleksi. Metode evaluasi koleksi yang tersedia tidak ada yang sempurna untuk dapat digunakan secara tunggal. Oleh karena itu disarankan menggunakan kombinasi beberapa metode, sehingga dapat saling menutupi kekurangan masing-masing metode. Bila evaluasi koleksi ini sudah dilakukan secara rutin, akan terasa semakin ringannya tugas ini, terlebih bila diingat bahwa proses ini akan membawa koleksi perpustakaan semakin dekat dengan kebutuhan komunitas yang dilayani.

### 3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Staf perpustakaan bertaraf internasional memiliki kompetensi profesional dan kompetensi individual. Menurut US Special Library Associations, kompetensi profesional terkait dengan pengetahuan pustakawan di bidang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen dan penelitian, serta pengetahuan kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi. Sementara kompetensi individual menggambarkan satu kesatuan ketrampilan, perilaku dan nilai yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuan, dapat memperlihatkan nilai lebih serta dapat bertahan terhadap

---

<sup>10</sup> Diunduh dari <http://pustaka.uns.ac.id/?opt=1001&menu=news&option=detail&nid=8>, 20/05/2009

perubahan dan perkembangan dalam dunia kerjanya. (University of Philipine memiliki sertifikasi (ISO) pustakawan dari pemerintah).<sup>11</sup>

Pustakawan adalah seorang yang menyelenggarakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu yang dimiliki melalui pendidikan.<sup>12</sup> Pustakawan adalah profesi, artinya seseorang yang memiliki kompetensi yg diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan & pelayanan perpustakaan.<sup>13</sup>

Perkembangan teknologi telah menimbulkan kekawatiran tersendiri di kalangan pustakawan, dimana ada kecenderungan bahwa tugas-tugas manusia pada akhirnya akan tergantikan oleh komputer atau mesin. Persepsi ini tentu saja keliru mengingat kegiatan di perpustakaan adalah kegiatan 'kemanusiaan'. Teknologi tidak dapat memahami pengguna perpustakaan sebagai 'manusia seutuhnya' dengan segala kebutuhan informasinya. Teknologi hanyalah alat bantu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Namun untuk dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Sinergi antara manusia yang kompeten dan kecanggihan teknologi akan menghasilkan 'manusia-manusia' baru keluaran perpustakaan.

Masalah SDM di perpustakaan harus selalu mendapat perhatian serius dari universitas. Hal ini penting mengingat perpustakaan adalah sarana publik yang dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademika di universitas. Penempatan staf yang tidak kompeten di perpustakaan sebetulnya tidak mengatasi

---

<sup>11</sup> Nn, *Perpustakaan Sebagai Salah Satu Indikator Utama dalam Mendukung Universitas Bertaraf Internasional*, diunduh dari <http://pinakesconsulting.wordpress.com>, 20/05/2009.

<sup>12</sup> Kode Etik Pustakawan dalam Kiprah Pustakawan. (Jakarta: IPI, 1998), 1

<sup>13</sup> Supriyanto. "Kompetensi&Sertifikasi Profesi Pustakawan : Implikasi UUU Perpustakaan No.43 Th.2007" 2008. lihat juga dalam Tawwaf, Muhammad. "UU No.43/2007 Payung Hukum Perpustakaan" Riau Pos 2008. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

masalah SDM di suatu universitas, melainkan justru mencoreng 'wajah' sendiri karena kualitas staf di perpustakaan menjadi salah satu indikator penilaian layanan prima di suatu universitas. Maka kompetensi menjadi persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh sumber daya manusia di perpustakaan, karena kompetensi menawarkan suatu kerangka kerja yang efektif dan efisien dalam mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas. Sumber daya manusia atau tenaga kerja yang memiliki kompetensi memungkinkan setiap jenis pekerjaan dapat dilaksanakan dengan optimal, efektif dan efisien.

Di samping itu ada beberapa kendala lain yang dialami dalam pengelolaan SDM, yaitu [1] Penempatan SDM di perpustakaan merupakan hak atau kebijakan universitas, yang seringkali tidak memahami kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan Perpustakaan; [2] Perpustakaan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan stafnya; [3] Pustakawan tidak merasa memiliki 'masalah' dengan kompetensinya; [4] Pustakawan menganggap teknologi adalah ancaman atau 'musuh'.

Solusi yang dapat ditempuh agar dapat keluar dari kendala-kendala tersebut adalah [1] Rekrutmen untuk staf perpustakaan harus melibatkan profesional dari bidang Perpustakaan dan psikologi. Hal ini mutlak dilakukan mengingat staf perpustakaan akan berhadapan dengan multi karakter yang menuntut kemampuan berkomunikasi yang baik dan memiliki jiwa asertif. Perlu diingat bahwa tidak semua orang memiliki jiwa melayani; [2] Pengembangan staf dapat dilakukan secara internal, dengan memanfaatkan jaringan perpustakaan terdekat. Misalnya mengirim staf magang di perpustakaan terdekat yang lebih maju; [3] Terapkan sistem "*the right man on the right place*" berdasarkan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*); [4] Tingkatkan kemampuan berkomunikasi pustakawan dengan memberi kursus bahasa asing; [5] Kenalkan teknologi terhadap staf dengan cara persuasif. Sebelum menerapkan teknologi, perlu sosialisasi yang intens terhadap semua staf sehingga menimbulkan '*trust*' terhadap teknologi. Proses ini dilakukan

dengan tetap mengacu pada target. Pada kasus tertentu, perpustakaan perlu menempuh keputusan radikal: "take it or leave it!"

#### 4. Pengelolaan Layanan

Perpustakaan bertaraf internasional memiliki beragam jenis layanan yang dapat mengakomodir kebutuhan semua jenis pengguna. Peningkatan mutu layanan menjadi prioritas dengan cara melakukan evaluasi rutin. (Perpustakaan Universitas Kebangsaan Malaysia melakukan sertifikasi (ISO) terhadap layanannya). Layanan perpustakaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Jenis layanan di perpustakaan seharusnya mengakomodir kebutuhan semua pengguna. Misalnya, perpustakaan tidak harus menghapuskan layanan konvensional seperti katalog kartu jika masih ada pengguna yang membutuhkan. Seluruh jenis layanan yang ada di perpustakaan harus berorientasi kepada kepuasan pengguna.<sup>14</sup>

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan layanan, biasanya adalah Perpustakaan tidak mengetahui layanan apa yang paling dibutuhkan pengguna. Untuk itu Solusi yang dapat ditempuh adalah lakukan evaluasi layanan secara reguler (minimal 1 kali setahun). Evaluasi dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sederhana mengenai layanan apa yang paling dibutuhkan pengguna.

Sistem layanan perpustakaan harus menunjang pelaksanaan program pendidikan, di antara layanan pokok perpustakaan adalah yang antara lain adalah [1] menimbulkan, menanamkan serta membina minat anak membaca, sehingga membaca merupakan suatu kebiasaan bagi siswa agar membaca menjadi kegemarannya; [2] memperluas horison pengetahuan siswa dengan menyediakan berbagai buku-buku pengetahuan; [3] Ikut membantu perkembangan bahasa dan

---

<sup>14</sup> Nn, *Perpustakaan Sebagai Salah Satu Indikator Utama Dalam Mendukung Universitas Bertaraf Internasional*, diunduh dari <http://pinakesconsulting.wordpress.com>, 20/05/2009/05

daya pikir siswa, dan untuk memberi dorongan peserta didik ke arah *self study*.<sup>15</sup>

## 5. Pengelolaan Sistem Dan Teknologi

*Perpustakaan bertaraf internasional tidak harus menggunakan teknologi mutakhir tetapi selalu memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk memuaskan pengguna dalam hal aksesabilitas.* Sistem dalam konteks perpustakaan merupakan seperangkat aturan atau ketentuan yang ada di perpustakaan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi perpustakaan secara optimal. Sistem juga sangat berkaitan dengan teknologi yang digunakan. Pemanfaatan teknologi di perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan, efektifitas dan efisiensi waktu serta sumber daya manusia serta ragam informasi yang dikelola. Penerapan teknologi di perpustakaan juga telah menciptakan berbagai konsep seperti otomasi perpustakaan dan *digital library*. Teknologi juga memberi peluang untuk mengembangkan jaringan kerja sama dan *resource sharing* antar perpustakaan.<sup>16</sup>

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sistem dan teknologi, biasanya adalah [1] Pustakawan terlalu kaku menerapkan aturan di perpustakaan, sementara sistem tidak memberi peluang untuk fleksibilitas; [2] Bagi universitas, investasi teknologi di perpustakaan sering dianggap sebagai *cost* yang tidak membawa benefit nyata; [3] Teknologi yang canggih tidak menjamin operasional perpustakaan selalu berjalan lancar.

Solusi yang dapat ditempuh, untuk keluar dari kendala tersebut adalah [1] Ciptakan sistem seluwes mungkin, sehingga tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna tetap tercapai tanpa menyalahi ketentuan; [2] Jalin kerjasama dengan pengembang sistem (vendor) atau

---

<sup>15</sup> A.R. Ibnu Ahmad Sholeh, *Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1999), 15.

<sup>16</sup> *Perpustakaan Sebagai Salah Satu Indikator Utama Dalam Mendukung Universitas Bertaraf Internasional*, diunduh dari /<http://pinakesconsulting.wordpress.com>, 20/05/2009/05

manfaatkan sumber daya internal untuk membangun sistem (*in house programme*); [3] Pilih teknologi yang digunakan oleh banyak orang sehingga memudahkan dalam hal *maintenance* dan *trouble shooting*; [4] Gunakan teknologi secara bertahap; [5] Ingat bahwa teknologi hanyalah alat bantu untuk memudahkan pekerjaan. Kunci keberhasilan teknologi tetap pada sumber daya manusia.

Analisis terhadap penerapan TI dalam sistem jaringan perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia dan kemungkinan penerapannya, menunjukkan bahwa TI memberikan kemudahan luar biasa kepada pengguna untuk mengakses informasi lintas batas. Di sisi lain TI, juga memberikan kemudahan bagi pengelola informasi (pustakawan) untuk mengolah, menyimpan dan menyebarkannya. Selain itu, TI juga menjadi sarana membangun perpustakaan elektronik yang kehadirannya tidak bisa dihindari. Dengan mensurvey beberapa perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia, didapatkan gambaran tentang kesiapan perpustakaan perguruan tinggi menyambut "makhluk baru" dalam dunia informasi yaitu perpustakaan elektronik. Terbentuknya jaringan informasi – dan perpustakaan elektronik di dalamnya – sangat diperlukan bagi perguruan tinggi, guna memberikan akses yang besar kepada pemakai (mahasiswa, dosen, peneliti) terhadap perkembangan pengetahuan dari detik ke detik. Keniscayaan untuk membentuk *learning society* di perguruan tinggi, salah satu caranya ialah dengan meningkatkan kemampuan menggunakan TI, dan selalu mengikuti perkembangannya. Bahan pustaka dalam bentuk elektronik perlu diperbanyak, agar selain memperbesar akses terhadap informasi juga mempermudah pengelolaannya. Yang tidak kalah penting lagi adalah dengan semua itu, meningkatlah kualitas dan citra perguruan tinggi.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Diunduh dari <http://pustaka.uns.ac.id/?opt=1001&menu=news&option=detail&nid=121>, 20/05/2009

## 6. Pengelolaan Fasilitas

*Perpustakaan bertaraf internasional tidak selalu memiliki fasilitas mewah, tapi lengkap dan selalu berfungsi optimal.* Fasilitas di perpustakaan menjadi salah satu indikator yang dijadikan pengguna untuk menilai atau mengukur kinerja perpustakaan. Layanan di perpustakaan akan berjalan secara optimal jika didukung dengan fasilitas yang tepat. Fasilitas di Perpustakaan tidak hanya ditujukan untuk pengguna, tapi juga untuk staf. Lembaga harus memfasilitasi staf dengan baik untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Kendala yang dialami biasanya adalah [1] Gedung perpustakaan tidak dirancang sesuai kebutuhan jangka panjang, tapi dimanfaatkan sesuai keadaan gedung; [2] Anggaran pengadaan fasilitas seringkali mengabaikan *maintenance*. Solusi yang dapat ditempuh adalah [1] Pembangunan atau perancangan gedung perpustakaan harus direncanakan secermat mungkin dengan tetap berprinsip pada efisiensi dan efektifitas fungsi; [2] Lakukan pemeliharaan fasilitas secara rutin dan cermat; [3] Manfaatkan tenaga *outsourcing* untuk fasilitas-fasilitas mahal tapi tidak dibutuhkan untuk jangka panjang

## E. Penutup

Perpustakaan adalah salah satu indikator utama untuk mendukung terciptanya *learning society* di kampus. Sebagai langkah awal, adalah membenahi perpustakaan dengan tahap-tahap berikut. *Pertama*, Bentuk *library board* untuk tingkat Nasional. *Brainstorming* dan bersinergi dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan perguruan tinggi negeri dan swasta yang sudah dianggap cukup berhasil dalam mengembangkan perpustakaan. Di samping itu Manfaatkan pakar-pakar dari setiap perguruan tinggi untuk mengkaji dan memberikan masukan. *Kedua*, Tetapkan visi. Lakukan studi banding ke perpustakaan perguruan tinggi lain di luar negeri yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan perpustakaan bertaraf internasional. *Ketiga*, Kaji kebijakan. *Review* kebijakan yang ada sekarang menyangkut pengembangan perpustakaan perguruan tinggi. Serta Libatkan

pimpinan universitas untuk memikirkan mengenai *copyright*, karena hal ini menyangkut publikasi perpustakaan. *Keempat*, Kembangkan secara bertahap. Pilih perguruan tinggi yang dapat dijadikan sebagai *pilot project* dengan jangka waktu tertentu. *Kelima*, Bentuk konsorsium. Gunakan teknologi yang sudah ada. *Keenam*, Bentuk jaringan. Manfaatkan para pengusaha di bidang *online database*, pengembang *software*, penerbit, media dan pihak-pihak terkait sebagai sponsor.

### DAFTAR PUSTAKA

Danim, Danim. *Menjadi Komunitas Pembelajar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003 <http://pustaka.uns.ac.id/?opt=1001&menu=category&option=detail&cid=1>, 20/05/2009

Nn, *Perpustakaan Sebagai Salah Satu Indikator Utama Dalam Mendukung Universitas Bertaraf Internasional*, diunduh dari /<http://pinakesconsulting.wordpress.com>, 20/05/2009

<http://pinakesconsulting.wordpress.com/2009/05/20/perpustakaan...>

Nn, *Kode Etik Pustakawan dalam Kiprah Pustakawan*. Jakarta: IPI, 1998  
Muhaimin. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Sholeh, A.R. Ibnu Ahmad. *Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1999

Sidi, Indra Djati. *Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Jakarta: Paramadina, 2001.

Supriyanto. "Kompetensi&Sertifikasi Profesi Pustakawan: implikasi UU Perpustakaan No.43 Th.2007" 2008.

Tawwaf, Muhammad. "UU No.43/2007 Payung Hukum Perpustakaan" Riau Pos 2008. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Tilaar, H.A.R. *Paradigama Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.